

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup setiap masyarakatnya melalui beberapa upaya pembangunan ekonomi. Karena masyarakat merupakan bagian terpenting dalam penentu kesejahteraan suatu negara. Namun demikian, proses pembangunan ekonomi tersebut tidak terlepas dari peran perusahaan. Baik perusahaan milik negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta. Dalam proses pembangunan ekonomi sebuah negara tidak terlepas dengan permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

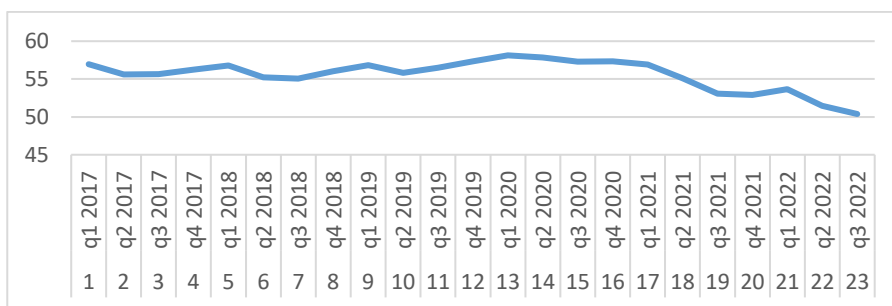
Tingkat kesejahteraan sebuah negara dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana salah satu indikator IPM adalah kehidupan yang layak (*decent standard of living*). Standar hidup merupakan acuan yang berkaitan dengan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan rata-rata yang digunakan sebagai ukuran minimal yang harus terpenuhi agar masyarakat mampu menjalani hidup yang layak (Gilarso, 2004). Kehidupan yang layak ini dapat diukur dengan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*) yang kemudian kemampuan daya beli masyarakat sendiri dapat dilihat dari besarnya tingkat konsumsi masyarakat.

Tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan perkapita masyarakat dan juga seberapa besar upah minimum provinsi yang ditetapkan

pada suatu provinsi tersebut dimana semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka akan membuat meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat dan sama halnya pada Upah Minimum Provinsi (UMP), semakin tinggi standar UMP yang ditetapkan oleh setiap provinsi di Indonesia maka masyarakat mampu untuk melakukan aktivitas mengkonsumsi dan daya beli sesuai dengan harga yang berlaku di pasar saat ini.

Rendahnya nilai daya beli dalam suatu masyarakat dapat menunjukkan bahwa kondisi perekonomian suatu wilayah pada suatu waktu mengalami penurunan, sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan dalam konsumsi barang dan jasa serta menurunnya standar hidup dari masyarakat untuk kesejahteraan hidupnya. Berikut diajikan data terkait tingkat konsumsi rumah tangga masyarakat Indonesia.

Tingkat Konsumsi Rumah Tangga (TW 1 2017-TW III 2022)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Grafik 1.1

Tingkat Konsumsi Rumah Tangga (TW 1 2017-TW III 2022)

Data diatas menunjukkan penurunan tren pengeluaran konsumsi rumah tangga sejak triwulan II-2020 dan mencapai level terendah pada triwulan III-

2022. Tingkat konsumsi masyarakat yang menjadi salah satu komponen penting penopang perekonomian nasional perlu selalu diperhatikan karena lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) Indonesia bersumber dari pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia.

Faktor penentu daya beli masyarakat lainnya ialah harga, semakin tinggi harga yang ditetapkan maka keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang tersebut bisa menjadi rendah, sebaliknya jika harga barang rendah maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi. Kenaikan harga pada beberapa komoditi disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya kenaikan pada harga input, perubahan iklim, hingga menurunnya produktivitas dalam memproduksi suatu komoditas. Menurunnya produktivitas dalam teori efisiensi upah dapat disebabkan oleh rendah tingginya Upah Minimum yang ditetapkan.

Menurut teori efisiensi upah, upah yang maksimal dapat membuat tenaga kerja lebih produktif dibandingkan upah minimal. Karena itu, upah dapat dijadikan sebagai pendorong produktivitas serta motivasi dan memperkuat hubungan antara pengusaha dan pekerja (Mankiw, 2007). Teori ini juga menyampaikan bagaimana upah mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pekerja yang dibayar dengan upah yang layak mampu melakukan aktivitas konsumsi sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya sehingga mampu membuat pekerja lebih sehat dan produktif. Teori ini berlaku pada negara yang masih tergolong menjadi negara miskin dan berkembang.

Peningkatan upah minimum selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, juga dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas Sumber daya manusia (SDM) pada pasar tenaga kerja. Sehingga, peningkatan upah minimum akan menyebabkan kenaikan pada biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat maka produsen atau pengusaha dituntut untuk meningkatkan harga barang dan jasanya, sehingga akan memberi pengaruh kepada kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi.

Rambatan melambungnya kenaikan harga pada beberapa jenis komoditi diatas berisiko terjadi inflasi. Keberadaan inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian nasional sehingga menjadikan inflasi sebagai indikator dalam pertumbuhan ekonomi (Panjaitan & Wardoyo, 2016). Secara empiris pemerintah telah menetapkan kebijakan subsidi guna menahan laju inflasi dalam tempo waktu tertentu akan tetapi kebijakan ini menyebabkan beban subsidi menjadi bertambah berat yang berdampak pada masyarakat karena masyarakat tidak dapat menikmati harga barang subsidi, dalam hal ini juga menyebabkan adanya kenaikan laju inflasi. Tingginya inflasi jika tidak terkendali akan menyebabkan hiperinflasi yang menjadikan perekonomian lesuh bahkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menjadikan kemerosotan dalam hal perekonomian (Nur, 2012). Berdasarkan tabel 1.1 dibawah ini data inflasi pada Kuartal II-2022 sudah menyentuh level 5,95% yoy dimana ini sudah diluar proyeksi pemerintah yang mana inflasi hanya di kisaran 3% sampai akhir tahun 2022. Dari 90 kota di Indonesia, 88 diantaranya mengalami inflasi dan sisa kota lainnya mengalami deflasi.

Kenaikan tingkat inflasi ini secara langsung akan menjadi penyebab turunnya tingkat daya beli masyarakat (Silvia, 2021).

Tabel 1.1

**Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun
2020-2022 (persen)**

Tingkat Inflasi	Tahun		
	2020	2021	2022
September	-0,05	-0,04	1,17
Tahun Kalender (Januari-September)	0,89	0,80	4,84
Tahun ke Tahun (September tahun n terhadap September tahun n-1)	1,42	1,60	5,95

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Inflasi yang terjadi juga terlihat pada tingkat pengeluaran masyarakat yang mengalami penurunan indeks khususnya pada kelompok makanan, minuman, tembakau, serta kelompok informasi komunikasi, dan jasa keuangan. Jika pendapatan yang dimiliki masyarakat cenderung lebih rendah dari harga barang yang ditetapkan saat ini maka akan menjadi kesulitan bagi masyarakat kelas bawah dan kelas menengah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. mereka cenderung akan mengurangi konsumsinya sehingga timbul ketidakseimbangan di dalam pasar seperti yang terjadi saat ini dimana tingkat konsumsi masyarakat mulai melemah sedangkan harga barang dan jasa mengalami peningkatan harga. Penyesuaian pendapatan penting dilakukan guna menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian pendapatan merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah. Penyesuaian pendapatan

dilakukan dengan maksud meningkatkan taraf hidup dan mengurangi perbedaan pendapatan antar masyarakat (Suhendra & Ginanjar, 2021).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat dilihat dari tren tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia seperti tingkat pendapatan, tingkat harga hingga menyebabkan inflasi. Maka diduga, kenaikan upah minimum memiliki dampak kepada perekonomian di Indonesia karena ketika kebijakan upah minimum oleh pemerintah lebih tinggi dari inflasi daya beli masyarakat dapat terjaga. Kemudian, meningkatnya inflasi juga mempengaruhi perekonomian Indonesia terutama dari sisi daya beli masyarakat yang dimana kenaikan inflasi ini disebabkan oleh adanya kontraksi biaya produksi yang melambung tinggi akibat adanya dorongan dari kenaikan harga bahan baku, bersamaan dengan melambunnya harga bahan baku dan terbatasnya pendapatan Sebagian masyarakat di Indonesia membuat suatu hambatan bagi masyarakat tersebut dalam melakukan kegiatan daya beli seperti biasanya, sehingga memicu terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menguji secara statistik apakah tingkat upah minimum provinsi (UMP) subsidi, meningkatnya Inflasi, dan Pendapatan Perkapita Masyarakat di Indonesia akan berdampak kepada kemampuan daya beli masyarakat di Indonesia dengan periode tahun 2017-2021. Berdasarkan latar belakang di atas dimana secara teori bahwa setiap

variabel berkemungkinan memiliki pengaruh serta hubungan positif dan signifikan, maka peneliti kemudian tertarik untuk menguji pengaruh di setiap variabelnya secara akurat dengan metode statistik regresi data panel dan asumsi klasik dengan judul “Analisis Determinan Daya Beli Masyarakat di Indonesia”.

A. Batasan Masalah

Ruang lingkup yang luas dalam penelitian ini, membuat peneliti melakukan pembatasan masalah agar pembahasan lebih fokus dan terarah sesuai dengan masalah pokok yang tercantum dalam rumusan masalah. Adapun penelitian ini dibatasi pada:

1. Permasalahan yang diteliti yaitu pengaruh kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Inflasi, dan Pendapatan Perkapita Masyarakat terhadap Daya Beli Masyarakat di Indonesia tahun 2017-2021.
2. Periode Penelitian yaitu selama lima tahun dari 2017-2021.
3. Variabel yang diteliti yaitu tingkat UMP, Inflasi, Pendapatan Perkapita Masyarakat dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Daya Beli Masyarakat di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Perkapita Masyarakat terhadap Daya Beli Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana pengaruh tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Daya Beli Masyarakat di Indonesia pada tahun 2017-2021.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat di Indonesia pada tahun 2017-2021.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Perkapita Masyarakat terhadap Daya Beli Masyarakat di Indonesia pada tahun 2017-2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun peneliti mengharapkan beberapa manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Ilmu Pengetahuan diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah lebih lanjut dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya penelitian yang terkait dengan pengaruh tingkat upah minimum provinsi (UMP), Tingkat Inflasi, serta Pendapatan Perkapita Masyarakat terhadap daya beli masyarakat di Indonesia.
2. Bagi Penulis Dapat menjadi wadah untuk menambah wawasan dan mengetahui tentang hubungan antara variabel yang berhubungan maupun tidak berhubungan dan memperoleh ilmu.

3. Untuk Akademis diharapkan penelitian ini bisa digunakan untuk bahan referensi atau alat rujukan untuk para akademisi sekaligus peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh kenaikan UMP, Tingkat Inflasi, dan Pendapatan Perkapita Masyarakat terhadap daya beli masyarakat di Indonesia.